

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENELITIAN

No: /UPPM-STP/I/2017

III.A.e.B

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Ketut Daging, A.Pi., MM.
NIP : 196608031992031012
Jabatan : Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)

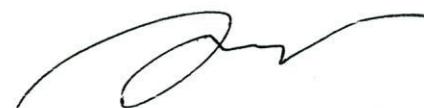
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dadan Zulkifli, S.Ag., MM
NIP : 196803141999031003
Jabatan : Lektor Kepala

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ilmu dengan menulis artikel pada media cetak Swara Pendidikan pada bulan Desember 2016 dan Januari 2017

Jakarta, 06 Februari 2017

Kepala UPPM



I Ketut Daging, A.Pi, MT
NIP. 19660803 199203 1 012

Manajemen Konflik Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir

Oleh : Dadan Zulkifli, MM (Dosen Sekolah Tinggi Perikanan)

Melihat kondisi kehidupan masyarakat nelayan saat ini, rasanya bisa tidak diterima bahwa sebuah negeri bernama Indonesia yang memiliki laut begitu luas, masih tertinggal dalam pengelolaan kawasan pesisirnya. Kawasan pesisir di Indonesia masih dikenal sebagai tempat tinggal masyarakat miskin yang termarginalisasi, memiliki karakter yang keras dan cendrung dalam berbagai masalah kepemilikan dan pengelolaan sumberdaya alamnya, sarat pendekatan konflik dan cenderung rumit. Berdasar kondisi diatas seyogianya pengembangan wilayah pesisir di Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga konflik-konflik yang akan muncul dapat dijadikan konflik "fungsional" yang akhirnya dapat menjadi faktor pendukung dalam pembangunan nasional.

POTENSI KONFLIK TATA BATAS LAUT DI INDONESIA

Potensi kelautan di Indonesia hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 20 % terhadap PDB padahal negara tetangga seperti Seperti Islandia, Norwegia, Spanyol, Jepang, RRC, Korea Selatan, Selanda Baru, serta Thailand memberikan kontribusi rata-rata lebih dari 30 persen yang nota bene wilayah perairannya tidak selaras negeri ini. Hal ini menyebabkan betapa besarnya potensi untuk pengembangan wilayah pesisir sebagai sumber randanan bagi rumah tangga

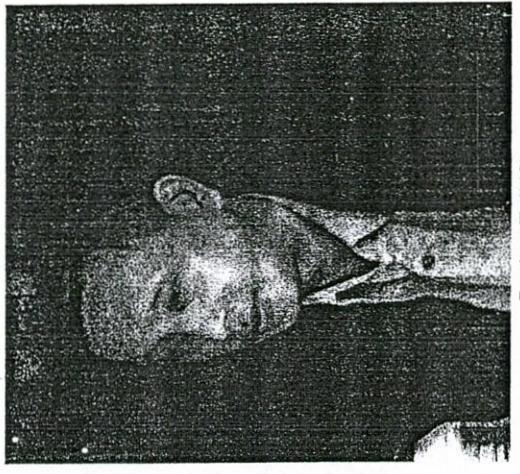
Suku bangsa ini mendiami 30 ribu pulau dan kepulauan yang satu atau lainnya dipisahkan oleh lautan dan pegunungan. Belum lagi segi etnik, belum lagi agama dimana Negara "mengakui 6 agama resmi". Keragaman tersebut hanya dibingkai dengan kata-kata ajalib "Bhinneka Tunggal Ika" yang artinya berbeda-beda tapi satu yang kini semakin berkurang daya lekatnya. Hal ini seiring dengan era otomomi daerah yang ditafsirkan dalam penguatan rasa etnis, suku, ras bahkan agama dalam arti sempit (primordialisme). Maka pentingnya jumlah rasio terjadinya konflik di masing-masing wilayah baik secara vertical ataupun horizontal juga akan dipicu oleh perbedaan budaya, etnis, suku dan agama.

POTENSI KONFLIK PESISIR DAN KELAUTAN DI JAWA BARAT

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara $5^{\circ}50' - 7^{\circ}50'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ}48' - 108^{\circ}48'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah daratan $3.710.061,32$ hektar. Jumlah pereduksinya pada tahun 2011 mencapai 46.497.175 jiwa (Sumber : Database SIAK Provinsi Jawa Barat Tahun 2011).

Pengelolaan kawasan pesisir secara top down telah menimbulkan sejumlah konflik terbuka di beberapa wilayah, ataupun konflik latent yang siap meledak kalau tersentuh pemicunya hal ini disebabkan

3. Kekhawatiran sistem kompensasi (ganti rugi) pembangunan infra struktur umum yang berpotensi melibatkan kepemilikan baru tanah/lahan masyarakat pesisir.
4. Kekhawatiran terhadap okupasi sepihak oleh pihak – pihak tertentu atas tanah/lahan masyarakat pesisir.
5. Ketidakjelasan penjaminan pemerintah atas hak milik atau ulayat tanah/lahan masyarakat pesisir.
6. Kekhawatiran terhadap rencana pemerintah membangun green belt (zona penyanga hijau) untuk menangguangi bencana Tsunami, yang melibatkan tanah/lahan kepemilikan masyarakat pesisir.
7. Kekhawatiran adanya "pemasaran" program yang melibatkan masyarakat pemilik tanah/lahan saja di masyarakat pesisir.
8. Ketakutan masyarakat bahwasanya program pengembangan kawasan pesisir hanya proyek dan pencapaian target dari instansi pemerintah, yang hanya akan memperkaya para pelaksana saja.
9. Kekhawatiran terhadap penanganan tanah/lahan kepemilikan yang di dominasi melalui konsultasi dengan "pihak-pihak tertentu" saja



Dadan Zulkifli
Dadan Zulkifli
Masyarakat pesisir selalu mengalami konflik sosial dan terjadinya perpecahan kapan dan dimana sajia.
3. Setiap elemen dalam masyarakat pesisir menyumbang disintegrasi dan membawa perubahan.
4. Setiap masyarakat dikawasani pesisir dipaksa untuk tunduk yang didasarkan pada keberadaan orang yang berkuasa.
5. Konflik realistik dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan, seperti aksi mogok kerja misalnya dilakukan karena ingin menuntut upah yang lebih baik. Sedangkan konflik non realistik berupa konflik nonkonstruktif.

Persisir juga dari date di saran untuk membangun perekonomian makro Indonesia.

Pengelolaan kawasan persisir dapat berjalan apabila mampu meminimalkan segala konflik kepentingan (conflict of interest) baik itu berupa natural system, human system dan managemen system. Konflik kepentingan ini bukan hanya melibatkan antar batas-batas kabupaten/kota akan tetapi juga antar batas-batas Negara tetangga. Peran serta stakeholder oleh karenanya sangat penting sekali mulai dari level bawah hingga level paling atas, disamping adanya kepastian hukum antar negara dalam menanggulangi konflik kepentingan di kawasan persisir.

POTENSI KONFLIK DALAM BUDAYA INDONESIA

Indonesia memiliki banyak ragam bangsa dan rumit sehingga sangat potensial lahirnya konflik. Bangsa Indonesia memiliki 656 Suku bangsa yang menyebar dari Sabang hingga Merauke. Berbagai

"terjadinya dualisme pengetahuan yang berbasis masyarakat sejak dulu dengan konsep top-down (Adi Waluyo:78, 2014). Munculnya konflik dalam pengelolaan kawasan persisir juga di sebabkan oleh ketidak-percayaan masyarakat terhadap keberhasilan program "apabila" dilaksanakan oleh pemerintah.

Potensi konflik dalam pengelolaan kawasan persisir di Jawa Barat, lebih banyak disebabkan oleh permasalahan tata batas, kepemilikan tanah dan tata ruang dan perangkat hukum sehingga lahir rasa kecemasan terhadap program di kawasan persisir. Kekhawatiran masyarakat persisir tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kekhawatiran terhadap wilayah persisir yang berpotensi melahirkan kepemilikan baru terhadap tanah/lahan masyarakat.
2. Kekhawatiran terhadap rencana perirntah yang akan membangun infrastruktur/fasilitas umum dengan cara melibatkan kepentingan baru terhadap tanah/lahan

PERLUNYA MENAJEMEN KONFLIK DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR DI JAWA BARAT.

Dalam perspektif konflik, masyarakat persisir mempunyai dua mata uang, sisi konflik dan sisi kerja sama, oleh karenanya diperlukan keterampilan menajemen (planning, organizing, directing and controlling) untuk mereduksi sejumlah konflik kepentingan dikawasan persisir. Konflik tersebut dapat fungsional apabila pertentangan-pertentangan tersebut dilembagakan secara efektif, dimana manfaat positif konflik akan membantu memperkuat struktur sosial. Dua sisi mata uang tsb adalah:

1. Masyarakat persisir, berpotensi untuk mengalami perubahan, proses perubahan sosial dapat terjadi dimana dan kapan saja.

SMPN 3 Depok Siap Ujian Berbasis Komputer

SWARA PENDIDIKAN (SUKMAJAYA)

Persiapan pelaksanaan Ujian Berbasis Komputer (UBK) di SMPN 3 Depok yang akan dilaksanakan pada Mei 2017 nanti sudah disiapkan sejak jauh hari, deniklan dikatakan Komar Suparmam Kepala SMPN 3 Depok diruang kantonya. Senin (23/1).

"Rencana ujian berbasis komputer merupakan program Puspendik Kemendikbud yang digulirkan sejak tahun lalu, dan baru tahun ajaran 2016/2017 ini SMPN 3 siap mengikuti program tersebut,"aku Komar.

Pelaksanaan UBK menurut Komar, memiliki persyaratan diantaranya jumlah komputer dan ruang kelas ujian yang

akan digunakan saat UBK minimal 40 persen dari jumlah siswa yang ikut ujian. Sementara jumlah siswa SMPN 3 kurang lebih 420 orang, "ini artinya kami harus sediakan 160 unit komputer dan 8 ruang kelas ujian, sebab idealnya satu kelas 20 peserta siswa ujian," jelas Komar.

Dia mengaku, untuk semestinya ini jumlah komputer yang dimiliki SMPN 3 baru

tersedia 30 unit komputer dan rencananya

untuk tambahan 80 unit lagi akan mem-

jam dari orang tua siswa selama UBK ber-

langsung.

Terpisah, Kepala Bidang Pendidikan

Dasar Dinas Pendidikan kota Depok Mu-

iyadi yang dikonfirmasi SP menjelaskan,

untuk persiapan awal UBK tingkat SMP

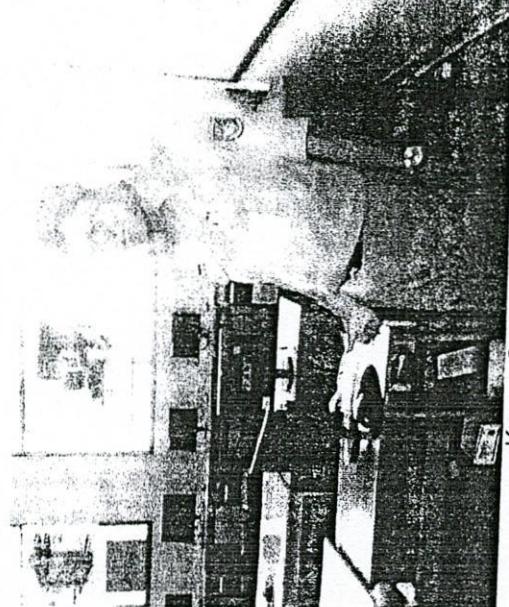
se kota Depok, Dinas Pendidikan akan melakukan mapping sekolah mana saja yang sudah siap untuk melaksanakan UBK tahun ini.

Menurut Mulyadi, kendala UBK secara umum selain harus memiliki unit komputer dan ruangan juga harus ada SDM ryta.

"Jadi harus ada sapras dan SDM, tidak cukup salah satunya, karena itu kesia-

panya dikembalikan lagi ke pihak sekolah," pungkas

Mulyadi.(Syahrul)



Komar Suparmam